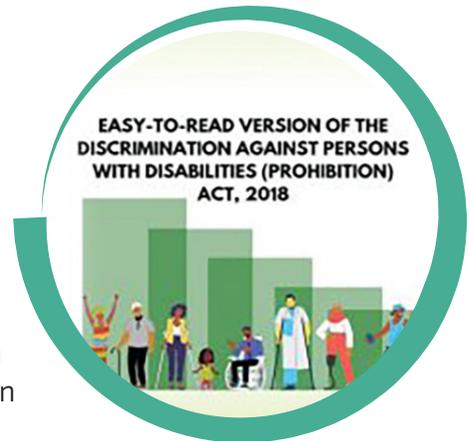

SOROTAN: Nigeria

Pengesahan UU (Pelarangan) Diskriminasi Terhadap Penyandang Disabilitas, 2019

Konteks Latar Belakang

Pada tahun 2011 dan 2015, parlemen nasional mengesahkan RUU (Pelarangan) Diskriminasi Terhadap Penyandang Disabilitas tahun 2009, tapi kemudian diveto oleh mantan presiden dan tidak disahkan menjadi UU. Setelahnya, RUU untuk UU yang baru disahkan oleh Dewan Perwakilan dan komite bersama Senat pada November 2016. Akan tetapi, hasilnya tidak dikirimkan ke Presiden untuk mendapatkan tandatangannya hingga Desember 2018.



Pada tahun 2019, Presiden menandatangani UU Disabilitas Nasional menjelang pemilihan umum setelah mendapatkan tantangan dari sebuah organisasi penyandang disabilitas (OPD) pada saat bincang-bincang media publik. UU itu akan memberikan hukuman kepada mereka yang mendiskriminasi seseorang karena disabilitasnya. Di antara ketentuan yang ada, UU itu mempersyaratkan pemerintah untuk memberikan penyesuaian yang diperlukan dan untuk membentuk sebuah Komisi Nasional Penyandang Disabilitas, yang sejak itu menjadi sekutu dan mitra yang penting bagi banyak OPD.

Siapa yang memimpin perjuangan ini?

Advokasinya dipimpin oleh Joint National Association of Persons with Disabilities (JONAPWD – Asosiasi Bersama Nasional Penyandang Disabilitas), sebuah organisasi induk bagi para penyandang disabilitas. Dana hibah untuk membangun koalisi kemudian menyatukan para mitra kunci, termasuk para pelaku pemerintahan. Kemenangan besar di Nigeria ini juga dimungkinkan karena adanya dukungan dari Association of Lawyers with Disabilities in Nigeria (ALDIN – Asosiasi Pengacara Dengan Disabilitas di Nigeria). Pengadopsian UU ini sejak saat itu digunakan oleh para sekutu gerakan hak-hak disabilitas, seperti Christian Blind Mission International di dalam mengembangkan Rencana Penanggulangan Kemanusiaan Nigeria 2023.



"The Act prohibits discrimination on the basis of disability and imposes sanctions, including fines and prison sentences, on those who contravene it." - JONAPWD

Tonggak-Tonggak Pencapaian 2018-2022

1. Setelah penundaan dan ketidakpastian selama bertahun-tahun, ALDIN menggunakan UU Kebebasan Informasi tahun 2018, dengan menuntut transparansi dari Parlemen Nasional Nigeria tentang status terkini dari RUU Disabilitas Nasional.
2. Bersama dengan OPD-OPD, JONAPWD memimpin sebuah kampanye media untuk meningkatkan tekanan agar RUU tersebut ditandatangani.
3. Pada Januari 2019, Presiden Nigeria menandatangani RUU itu menjadi UU, mengesahkan keberadaan UU (Pelarangan) Diskriminasi Terhadap Penyandang Disabilitas.
4. Pada Agustus 2020, Komisi Nasional Penyandang Disabilitas dibentuk selaras dengan Pasal 31 UU Disabilitas Nasional, membuka peluang untuk kebijakan dan pelaksanaan UU yang inklusi.
5. UU Disabilitas Nasional digunakan oleh OPD-OPD untuk mengadvokasi kebijakan-kebijakan dan program-program yang inklusi disabilitas.

Kenapa kemenangan ini begitu penting?

- UU tersebut menjadi sebuah fondasi penting bagi pekerjaan advokasi berbasis hak di Nigeria.
- UU tersebut menandakan sebuah pergeseran penting ke arah pengakuan hak-hak para penyandang disabilitas di Nigeria.
- UU tersebut memajukan agenda disabilitas sebagai sebuah permasalahan HAM.
- Kemenangan menjadi contoh kekuatan dari penyatuan berbagai OPD dan aktor pelaku pemerintah.

Kontribusi DRF/DRAF



Bantuan teknis yang diberikan DRF/DRAF ke JONAPWD telah berkontribusi terhadap dipekerjakannya seorang spesialis komunikasi untuk menciptakan kampanye-kampanye kesadaran publik di media-media sosial dan sejumlah konferensi pers. Hal ini membantu membentuk persepsi publik dan mendorong yang lainnya untuk menawarkan solidaritas mereka bagi pengesahan UU Disabilitas Nasional. Selain itu, hibah pembangunan koalisi dari DRF mendukung ALDIN di dalam memohon informasi mengenai status dari RUU Disabilitas Nasional dan memberikan sumber daya untuk upaya lobi mereka.